PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : **EKSEKUTIF**

LEMBAGA : **PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA**

UNIT KERJA : **SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SYAFRUDIN CHANDRA**
2. Jabatan : **CAMAT**
3. NHK : **745106**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 4.770.550.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 415 m2/109 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 2.163.550.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/300 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 701.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/60 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 401.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA PALEMBANG , HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/40 m2 di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 583.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 96 m2/60 m2 di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 742.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 391.500.000**

1. MOBIL, SUZUKI APV MINIBUS Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
2. MOTOR, PULSAR 200 DTSI SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000
3. MOTOR, SUZUKI UW 125 SC Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000

4. MOBIL, DAIHATSU TAFT INDEPENDEN JEEP Tahun 1996, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
5. MOTOR, HONDA CB 500XAN IN MT Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000

C.	**HARTA BERGERAK LAINNYA**	**Rp.**	**39.000.000**
D.	**SURAT BERHARGA**	**Rp.**	**----**
E.	**KAS DAN SETARA KAS**	**Rp.**	**634.357.542**
F.	**HARTA LAINNYA**	**Rp.**	**----**
	Sub Total	**Rp.**	**5.835.407.542**
III. HUTANG		**Rp.**	**----**
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)		**Rp.**	**5.835.407.542**

Catatan:
1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.